



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **CEPI RIYANA**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **448107**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/180 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 322 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 485 m2/50 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 494.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO - Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, MITSUBITSI DAKAR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BJM-L A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 268.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 65.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.577.500.000

III. HUTANG

Rp. 85.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.492.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.